

IMPLEMENTASI STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU) DALAM PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA BALIKPAPAN

Sely Adellia Arifin, Thalita Rifda Khaerani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 1, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Strategi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam Pengendalian Banjir di Kota Balikpapan.

Pengarang : Sely Adellia Arifin

NIM : 1902016072

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 19 Desember 2023

Pembimbing,



Thalita Rifda Khaerani, S.A.P., M.Si
NIP. 19890922 202203 2 012

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume	: 12	
Nomor	: 1	
Tahun	: 2024	
Halaman	: 29-39	

IMPLEMENTASI STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU) DALAM PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA BALIKPAPAN

Sely Adellia Arifin ¹, Thalita Rifda Khaerani ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi strategi Dinas Pekerjaan Umum dalam pengendalian banjir di Kota Balikpapan, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat implementasi strategi Dinas Pekerjaan Umum dalam pengendalian banjir di Kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian, yaitu program, anggaran, dan prosedur pengendalian banjir, serta faktor penghambat implementasi strategi Dinas Pekerjaan Umum dalam pengendalian banjir di Kota Balikpapan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam pengendalian banjir di Kota Balikpapan telah terlaksana dengan baik, yang diimplementasikan dalam program, anggaran, dan prosedur pengendalian banjir. Dari segi program telah dijalankan dengan baik, namun di beberapa titik banjir lainnya program pengendalian banjir belum dapat menyelesaikan masalah banjir dengan tuntas dan hanya dapat mengurangi debit air banjir saja, dikarenakan pengurangan dampak banjir yang bertahap dan ada beberapa faktor lingkungan yang menjadi penyebab. Dari segi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum telah mencukupi untuk pengerjaan pengendalian banjir yang disalurkan kepada dua program pengendalian banjir, namun pemanfaatan anggaran tersebut belum optimal. Dari segi prosedur dalam pengendalian banjir telah dijalankan dan tidak ada kendala pada pelaksanaannya. Selanjutnya, faktor penghambat implementasi strategi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam pengendalian banjir di Kota Balikpapan yaitu masyarakat yang kurang disiplin dalam membuang sampah, pengupasan lahan, dan faktor pasang air laut.

Kata Kunci : *Implementasi Strategi, Pengendalian Banjir, Program Pengendalian*

Pendahuluan

Indonesia dapat dicirikan sebagai satu dari banyaknya negara yang sangat rentan terhadap bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun oleh

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: selyadlla@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

manusia. Banjir merupakan salah satu bencana yang seringkali melanda Indonesia. Hermawan et al., (2019) mengungkapkan banjir dapat terjadi ketika waduk sungai tidak mampu menampung air yang mengalir melaluinya, menyebabkannya meluap dan menggenangi dataran terdekat atau daerah dataran rendah. Seiring perkembangan sungai, erosi dan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat menyebabkan penurunan daya tampung sungai. Berkurangnya daya tampung sungai akibat erosi dan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai tersebut akan menyebabkan banjir dan genangan.

Secara umum situasi banjir di Indonesia sangat memprihatinkan, khususnya di Kota Balikpapan. Kota terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Balikpapan yang memiliki luas wilayah 511,01 km², dimana 503,30 km² merupakan daratan dan 340,18 km² merupakan perairan (Anzward & Nasir, 2021). Kota Balikpapan memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Timur. Banyaknya jumlah penduduk di Kota Balikpapan tersebut juga terus meningkat pada setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan pada pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan, maka semakin kompleks juga permasalahan yang dihadapi oleh kota Balikpapan, termasuk banjir.

Dalam menangani permasalahan banjir di Kota Balikpapan, terdapat suatu Dinas yang menangani tentang hal tersebut, seperti yang dijelaskan melalui Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, yang mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan drainase primer dan sekunder dalam upaya penanggulangan banjir. Berdasarkan Rencana Strategis dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang menyatakan karena titik bencana banjir di Kota Balikpapan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi dan permukiman masyarakat, maka bencana banjir memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, sehingga penting untuk dilakukan pengendalian banjir. Adapun strategi Dinas Pekerjaan Umum dalam pengendalian banjir, yaitu “Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Memadai” dengan program yaitu berupa “Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase” dan “Program Pengelolaan Sumber Daya Air”. Strategi yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tentu tidak terlepas dari pelaksanaan (implementasi) strategi tersebut demi terlaksananya visi dari Dinas Pekerjaan Umum.

Ketika Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sudah memiliki strategi dalam menangani permasalahan banjir dan telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir, namun masalah banjir di Kota Balikpapan masih kunjung terjadi dan frekuensi banjir semakin parah di sepuluh tahun terakhir ini. Kemudian, pada tahun 2022 di Kota Balikpapan terhitung sebanyak 81 (delapan puluh satu) tempat yang menjadi titik banjir. Lokasi tersebut merupakan permukiman masyarakat dan tempat aktivitas ekonomi di Kota Balikpapan yang kerap kali terendam oleh air banjir ketika terjadi hujan deras. Upaya-upaya dan strategi dari Dinas Pekerjaan

Umum tersebut ternyata masih kalah dengan peningkatan pertumbuhan penduduk dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran air. Masyarakat juga masih kurang sadar akan tanggung jawab terhadap lingkungannya, seperti dalam hal pembersihan saluran drainase di sekitar tempat tinggalnya yang penuh karena sedimen, pasir, dan sampah, namun masyarakat tidak pula berinisiatif untuk membersihkan dan justru menunggu dinas teknis untuk membersihkan sampahnya. Oleh karenanya, hingga saat ini banjir di Kota Balikpapan belum dapat teratasi dengan maksimal.

Berdasarkan uraian mengenai fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang implementasi strategi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam pengendalian banjir di Kota Balikpapan, serta guna mengetahui faktor penghambat implementasi strategi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam pengendalian banjir di Kota Balikpapan.

Kerangka Dasar Teori

Strategi

Marrus dalam Metuak et al., (2022) mendefinisikan strategi adalah sebuah proses mengidentifikasi tujuan organisasi jangka panjang yang direncanakan oleh manajer puncak untuk difokuskan, bersama dengan penciptaan strategi atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Selaras dengan pandangan tersebut, Chandler dalam Taufiqurokhman, (2016) mengatakan bahwa strategi adalah memutuskan tujuan dan sasaran jangka panjang fundamental organisasi (perusahaan), mengadopsi serangkaian aktivitas, dan menyerahkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi adalah hal terpenting untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi secara efektif dan efisien, suatu organisasi harus mampu menghadapi setiap tantangan atau hambatan yang terjadi, baik dari dalam maupun luar perusahaan. Akibatnya, strategi sangat penting dan diperlukan bagi sebuah organisasi (Metuak et al., 2022).

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah keputusan atau langkah-langkah penentuan rencana yang ditetapkan oleh pemimpin puncak organisasi untuk dapat mencapai suatu tujuan organisasi atau mengatasi persoalan yang dihadapi oleh organisasi.

Manajemen Strategis

Hunger dan Wheelen dalam Novianto, (2019) mendefinisikan manajemen strategis sebagai pilihan manajemen dan tindakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Pandangan selaras dikemukakan oleh Jauch dan Gluech dalam Taufiqurokhman, (2016) yang mendefinisikan manajemen strategis adalah serangkaian pilihan dan tindakan yang menghasilkan rancangan strategi atau beberapa strategi efektif untuk membantu mencapai tujuan perusahaan.

Merujuk pandangan dari beberapa ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen strategis adalah rangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan oleh pimpinan organisasi tertinggi untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang.

Implementasi Strategi

Hariadi dalam Praminingtyas, (2015) mendefinisikan implementasi strategi adalah proses dimana strategi dan kebijakan diterapkan dengan menciptakan struktur, mengembangkan program, menetapkan anggaran, dan mengikuti proses pelaksanaan. Mengingat banyaknya elemen yang dapat mempengaruhi implementasi di lapangan dan mungkin berbeda dari perkiraan awal, maka implementasi dianggap sebagai tahapan yang paling sulit.

Implementasi strategi merupakan proses menempatkan strategi yang dibuat menjadi tindakan. Implementasi strategi sering disebut tahap tindakan manajemen strategik. Strategi implementasi berarti mengatur staf dan manajemen untuk mengimplementasikan strategi yang dikembangkan (Taufiqurokhman, 2016). Selanjutnya, Wheelen dan Hunger dalam Praminingtyas, (2015) menguraikan untuk meninjau proses implementasi strategi, perlu dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu program, anggaran, dan prosedur.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi adalah proses melaksanakan atau menjalankan strategi yang telah diformulasikan, melalui pembangunan struktur, pengembangan program, budget dan prosedur pelaksanaan.

Manajemen Bencana

Manajemen bencana didefinisikan oleh Shaluf dalam Kusumasari, (2014) sebagai kata yang digunakan untuk merujuk pada semua bagian kesiapsiagaan tanggap bencana, termasuk operasi sebelum dan sesudah peristiwa yang juga dapat disebut sebagai manajemen risiko dan konsekuensi bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan manajemen bencana adalah suatu proses yang dinamis dan berkesinambungan yang mengintegrasikan semua tahapan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas observasi dan analisis bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, manajemen darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi (Puri & Khaerani, 2017)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen bencana adalah suatu proses yang dinamis, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan mobilisasi sumber daya agar dapat merespon semua bencana atau seluruh keadaan darurat.

Pengendalian Banjir

Asdak dalam Hermawan et al., (2019) mendefinisikan banjir adalah aliran atau genangan air yang mengakibatkan kerusakan harta benda atau bahkan korban jiwa. Banjir secara teknis terjadi ketika kapasitas sungai terlampaui, yang menyebabkan air mengalir melewati tepian sungai dan menggenangi daratan di

sekitarnya. Sedangkan, Tanika dalam Hermawan et al., (2019) mendefinisikan banjir adalah debit sungai yang relatif lebih besar dari biasanya akibat hujan yang terus-menerus turun ke hulu atau di suatu lokasi tertentu, menyebabkan limpasan air melebihi kapasitas saluran atau palung sungai yang ada kemudian membanjiri daerah di sekitarnya.

Pengendalian banjir dalam arti luas adalah kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir, pemanfaatannya, dan pemeliharannya. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan banjir, mengatur penggunaan daerah dataran banjir, dan mengurangi atau menghilangkan risiko atau kerugian yang terkait dengan banjir (Kodoatie, 2013). Pengendalian banjir adalah mengalirkan kelebihan air ke tempat lain untuk menjaga agar tidak mengganggu tingkat kenyamanan yang ada. Pendekatan lama untuk pengendalian banjir adalah memastikan bahwa air diarahkan atau dibuang secepat mungkin ke hilir. Pendekatan baru untuk pengendalian banjir bertujuan untuk memperpanjang keberadaan air permukaan di suatu lokasi dengan meminimalkan gangguan terhadap lingkungan alam (Harmani & Soemantoro, 2015).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian banjir adalah suatu kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan agar dapat mengurangi risiko banjir dengan mengalirkan air banjir ke tempat lain, sehingga tidak mengganggu lingkungan yang ada.

Definisi Konseptual

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, maka definisi konseptual dari implementasi strategi dalam pengendalian banjir adalah proses melaksanakan atau menjalankan strategi pengendalian banjir yang telah diformulasikan, melalui kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir, pemanfaatan, dan pemeliharaan agar dapat mengurangi risiko banjir, sehingga tidak mengganggu lingkungan yang ada, terutama pada pemukiman masyarakat dan tempat aktivitas ekonomi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan berfokus pada implementasi strategi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam pengendalian banjir di Kota Balikpapan dengan mengacu pada tiga indikator teori yang dikemukakan oleh Hunger dan Wheelen yang terdiri dari program, anggaran, dan prosedur, selain itu faktor penghambat implementasi strategi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam pengendalian banjir di Kota Balikpapan. Dalam penelitian ini, pemilihan informan melalui metode *purposive sampling* dengan sumber data primer berasal dari *key informant* yakni Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan

Drainase, dan Kepala Seksi Perencanaan Pengawasan Sumber Daya Air dan Drainase. Informan lainnya yaitu Kepala TU UPT Dinas Pekerjaan Umum Drainase dan Bozem, Pengurus Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Balikpapan, dan Masyarakat yang terdampak banjir. Sedangkan sumber data sekunder berasal dokumen-dokumen, *website*, dan jurnal. Kemudian, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana yang tahapan analisisnya dimulai dari pengumpulan data, kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Strategi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam Pengendalian Banjir di Kota Balikpapan

Implementasi Strategi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam Pengendalian Banjir di Kota Balikpapan akan dibahas melalui 3 indikator teori proses implementasi strategi, yaitu program, anggaran, dan prosedur.

a. Program Pengendalian Banjir

Wheelen dan Hunger dalam Praminingtyas, (2015) menjelaskan bahwa program adalah daftar tindakan-tindakan atau langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana satu kali. Program meliputi reorganisasi perusahaan, mengubah budaya organisasi, dan peluncuran proyek penelitian baru.

Program pengendalian banjir yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai upaya implementasi strategi pengendalian banjir sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat melalui keberhasilan penurunan titik banjir melalui pengerjaan program-program pengendalian banjir. Titik banjir yang semula sebanyak 81 titik, kini turun menjadi 60 titik. Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum juga mencapai 53% dalam keberhasilan program pada indeks infrastruktur pengendalian banjir. Namun, di beberapa titik banjir lainnya, program pengendalian banjir yang telah dijalankan hanya dapat mengurangi debit air banjir saja agar tidak separah dibanding sebelum adanya program pengendalian banjir, tetapi tetap tidak menghilangkan banjir secara tuntas di titik tersebut.

Banjir di beberapa titik tersebut belum dapat teratasi, yang diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti hujan deras yang berdurasi lama, dataran rendah, parit yang sempit, dan masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang disiplin dalam membuang sampah. Dalam upaya pengendalian banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum, penyelesaian masalah banjir di titik-titik banjir tidak dapat langsung terselesaikan ketika diberikan pengerjaan fisik berupa program-program pengendalian banjir, dikarenakan ada banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan, maka pengurangan dampak banjir pun juga bertahap.

b. Anggaran Pengendalian Banjir

Wheelen dan Hunger dalam Praminingtyas, (2015) menjelaskan bahwa anggaran adalah setiap program yang akan memiliki biaya yang secara khusus dicantumkan agar manajemen dapat menggunakannya dalam mengonsep dan mengontrol kegiatan dan menetapkan dampak yang diharapkan dari keadaan keuangan melalui laporan keuangan kinerja. Satuan uang akan digunakan untuk menyatakan program.

Anggaran yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum telah mencukupi untuk pengerjaan pengendalian banjir yang disalurkan kepada dua program pengendalian banjir. Kemudian, waktu pencairan anggaran untuk pengendalian banjir selalu dicairkan tepat waktu oleh pemerintah di setiap akhir bulan Desember. Edward III dalam Roeslie dan Bachtiar, (2018) menjelaskan bahwa anggaran sangat terkait dengan apakah ada kecukupan dana yang tersedia untuk perencanaan dan pelaksanaan program atau kebijakan untuk memastikan bahwa program atau kebijakan tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini, untuk mengimplementasikan strategi maka harus didukung oleh kecukupan anggaran yang tersedia, agar dapat menyelesaikan semua program yang telah direncanakan.

Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2021 mempunyai anggaran untuk pengendalian banjir sebesar Rp 83.523.516.837 dan terealisasi untuk dua program pengendalian banjir sebesar Rp 52.597.192.938. Kemudian pada tahun 2022 mempunyai anggaran untuk pengendalian banjir sebesar Rp 178.277.311.860,00 dan terealisasi untuk dua program pengendalian banjir sebesar Rp 114.703.572.730,89, namun pemanfaat anggaran untuk implementasi strategi pengendalian banjir yang disalurkan kepada dua program pengendalian banjir tersebut belum optimal, karena berdasarkan data capaian anggaran dan realisasi, anggaran yang digunakan hanya sekitar 63% pada tahun 2021, sehingga untuk anggaran yang tidak digunakan atau terserap yaitu 37%. Kemudian juga pada tahun 2022 anggaran yang digunakan yaitu hanya 64%, sedangkan 36% dari anggaran tersebut tidak digunakan atau terserap untuk program-program pengendalian banjir.

c. Prosedur Pengendalian Banjir

Wheelen dan Hunger dalam Praminingtyas, (2015) menjelaskan bahwa prosedur sering dikenal sebagai *Standard Operating Procedures (SOP)* adalah metode yang menguraikan secara jelas tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Prosedur mempunyai peran penting dalam implementasi strategi. Dengan adanya prosedur, maka tahapan-tahapan dari kegiatan pengimplementasian strategi akan tersusun secara sistematis dan teratur.

Prosedur Dinas Pekerjaan Umum dalam pengendalian banjir telah dijalankan dan tidak ada kendala pada pelaksanaannya. Pada pengerjaan

pengendalian banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum, terdapat manajemen proyek dan metodologi pelaksanaannya. Selanjutnya, dalam melakukan salah satu program pengendalian banjir, yaitu yang berkaitan dengan pembuatan drainase maka Dinas Pekerjaan Umum juga mempunyai *masterplan* drainase untuk menyesuaikan pembuatan drainase yang tepat.

Pengerjaan pengendalian banjir yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari beberapa tahap, yaitu seperti tahap dalam penentuan titik banjir, tahap pengendalian banjir pada titik banjir yang bersifat sementara yang akan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum saat pasca banjir, dan tahap pengendalian banjir pada titik banjir yang luas yang diprogramkan untuk beberapa tahun.

Mulyadi dalam Istanti, (2020) menjelaskan bahwa prosedur adalah serangkaian tugas administratif yang dimaksudkan untuk memastikan penanganan standar atas kerja organisasi yang berulang-ulang, biasanya mengaitkan banyak individu dalam satu atau lebih departemen. Dalam implementasi strategi pengendalian banjir yang selama ini berjalan oleh Dinas Pekerjaan Umum di dalamnya terjalin koordinasi dengan banyak pihak, baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, namun semua pihak tersebut mempunyai kaitan dalam pelaksanaan prosedur pengendalian banjir, sehingga juga turut mendukung terselesaikannya masalah banjir yang terjadi.

Faktor Penghambat Implementasi Strategi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam Pengendalian Banjir di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hambatan-hambatan di dalam implementasi strategi Dinas Pekerjaan Umum dalam pengendalian banjir di Kota Balikpapan, yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka ditemukan faktor penghambat, yaitu masih banyak masyarakat yang tidak taat dalam membuang sampah pada tempat yang seharusnya dan yang telah disediakan. Terlebih masih ada masyarakat yang membuang sampah di saluran air, walaupun telah ada upaya berupa himbauan secara langsung dari Dinas Pekerjaan Umum kepada masyarakat melalui Reses, untuk tidak membuang sampah di saluran air karena dapat mengakibatkan banjir.
- b. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka ditemukan faktor penghambat, yaitu banyak terjadi pengupasan lahan di daerah utara Kota Balikpapan, seperti yang terjadi di daerah Batu Ampar, Karang Joang, Graha Indah, *Grand City* dan juga di Gunung Guntur. Aktivitas pengupasan lahan tersebut terjadi di dekat pemukiman warga dan merupakan wilayah padat penduduk, hingga pemukiman penduduk tersebut akhirnya terdampak banjir. Banjir akibat pengupasan lahan disebabkan karena tidak mempunya drainase untuk menampung debit banjir yang terjadi akibat tingginya sedimentasi.
- c. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka ditemukan faktor penghambat, yaitu faktor pasang air laut merupakan hambatan dalam

implementasi strategi pengendalian banjir dikarenakan ketika air laut tinggi maka UPT Dinas Pekerjaan Umum merasa kesulitan untuk membantu menurunkan air banjir. Adiyoso, (2018) menjelaskan bahwa peristiwa alam seperti curah hujan yang sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya, merupakan hal yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi strategi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam pengendalian banjir di Kota Balikpapan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi strategi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam pengendalian banjir di Kota Balikpapan telah terlaksana dengan baik. Hal ini diimplementasikan sesuai dengan konsep implementasi strategi dari Hunger dan Wheelen yaitu dalam program, anggaran, dan prosedur. Dimana, program pengendalian banjir yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sudah berjalan dengan baik. Namun, di beberapa titik banjir lainnya program pengendalian banjir belum dapat menyelesaikan masalah banjir dengan tuntas dan hanya dapat mengurangi debit air banjir saja, dikarenakan pengurangan dampak banjir yang bertahap dan ada beberapa faktor lingkungan yang menjadi penyebab. Kemudian, untuk anggaran Dinas Pekerjaan Umum dalam implementasi strategi pengendalian banjir tersedia dan telah mencukupi untuk pengerjaan pengendalian banjir yang disalurkan kepada dua program pengendalian banjir, serta anggaran selalu dicairkan tepat waktu oleh pemerintah, namun pemanfaatan anggaran untuk program-program pengendalian banjir belum optimal, karena hanya dipergunakan sekitar 63% pada tahun 2021 dan 64% pada tahun 2022. Selanjutnya, untuk prosedur Dinas Pekerjaan Umum dalam pengendalian banjir telah dijalankan dan tidak ada kendala pada pelaksanaannya. Pada pengerjaan pengendalian banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum, terdapat manajemen proyek, metodologi pelaksanaannya, dan *masterplan* drainase.

Faktor penghambat implementasi strategi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam pengendalian banjir di Kota Balikpapan adalah masyarakat yang masih kurang disiplin dalam membuang sampah, di sisi lain terdapat permasalahan pada lahan, seperti pengupasan lahan yang masih banyak terjadi, serta hambatan lainnya yaitu terletak pada faktor pasang air laut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, adapun saran yang dapat penulis berikan, antara lain:

1. Dinas Pekerjaan Umum dapat melakukan kerja sama dengan Ketua RT, Kelurahan, maupun Kecamatan setempat untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayahnya agar tidak membuang sampah di saluran air

- dan dapat memberikan sanksi bagi yang melanggar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu berupa teguran tertulis, teguran lisan, denda, dan kerja sosial dengan membersihkan lingkungan sekitar tempat pelanggaran.
2. Hendaknya Dinas Pekerjaan Umum bersama Pemerintah Kota Balikpapan menindak tegas pelaku pengupasan lahan di Kota Balikpapan dengan mengikuti aturan yang telah berlaku. Hal ini untuk menimbulkan rasa takut bagi para pelaku yang melakukan pengupasan lahan, terutama yang tidak memiliki izin dari dinas terkait.
 3. Faktor pasang air laut yang dapat mengakibatkan banjir dan menyulitkan dalam implementasi strategi pengendalian banjir, oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum hendaknya melakukan pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut.
 4. Perlu dioptimalkan penggunaan anggaran pada implementasi strategi dalam pengendalian banjir untuk efektivitas dari program pengendalian banjir yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Daftar Pustaka

- Adiyoso, W. (2018). *Manajemen Bencana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Anzward, B., & Nasir, M. (2021). "Evaluasi Implementasi Produk Hukum Daerah Kota Balikpapan Tentang Izin Membuka Tanah Negara". *Abdimas Universal*, 3(1), 60–66.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v3i1.105>
- Harmani, E., & Soemantoro, M. (2015). "Kolam Retensi Sebagai Alternatif Pengendali Banjir". *Jurnal Teknik Sipil Unitomo*, 1(1), 71–80.
<https://doi.org/10.25139/jtsu.v1i1.274>
- Hermawan, C., Masjaya, & Burhanudin. (2019). "Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pengendalian Banjir Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu". *EJournal Ilmu Pemerintah*, 7(1), 465–478. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3154>
- Istanti, E. (2020). "Evaluasi Prosedur Pengendalian Intern Atas Piutang Usaha Pada PT SPS (Depo Gedangan)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(3), 1–7.
<http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/727>
- Kodoatie, R. J. (2013). *Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Metuak, N., Nayoan, H., & Sumampow, I. (2022). "Strategi Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado)". *Jurnal Governance*, 2(2), 1–23.

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/43389>
- Novianto, E. (2019). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Praminingtyas, S. D. (2015). "Manajemen Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pada Implementasi Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)". *PUBLIKA*, 3(3). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11487>
- Puri, D. P., & Khaerani, T. R. (2017). "Strategi Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purworejo". *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 51–56. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/15567>
- Roeslie, E., & Bachtiar, A. (2018). "Analysis of Implementation Readiness of Healthy Indonesia Program With Family Approach (Indicator 8: Mental Health) in Depok City 2018". *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI)*, 07(02), 64–73. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36222>
- Taufiqurokhman. (2016). *Manajemen Strategik*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.